JAMINAN SOSIAL TERHADAP TENAGA KERJA PERUSAHAAN KONTRAKTOR di KOTA SAWAHLUNTO

SKRIPSI

Oleh

EDI SOFYAN 06 191 021



JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010

ABSTRAK

Edi Sofyan 06 191 021. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi : Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Perusahaan Kontraktor di Kota Sawahlunto. Pembimbing I Dra. Mira Elfina, Msi dan Pembimbing II Drs. Ardi Abbas, MT.65 halaman.

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang paling penting bagi perusahaan. Tenaga kerjalah yang menjalankan pekerjaan pabrik, merencanakan dan mengawasi, melakukan pekerjaan administrasi. Dalam melakukan pekerjaan, kecelakaan kerja tidak dapat dihindari oleh tenaga kerja. Fakta yang menjadi titik tolak keprihatinan adalah kenyataan bahwa banyak buruh yang belum mendapatkan jaminan sosial yang layak. Idealnya, setiap perusahaan harus memberikan jaminan sosial bagi setiap tenaga kerjanya. Namun dalam kenyataan, yang terjadi justru jauh lebih banyak perusahaan yang belum menyertakan semua tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah Mengapa perusahaan kontraktor tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan purposive sampling. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh di lapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang alasan-alasan perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamsostek. Dalam permasalahan ini peneliti melihat dari teori kapitalisme Karl Marx.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan pemilik perusahaan kontraktor tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamsostek adalah masih banyak pemilik perusahaan kontraktor yang tidak begitu mengerti tentang program jamsostek sehingga membuat pemilik tidak mau mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamsostek, kebiasaan perusahaan kontraktor lain yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamsostek membuat beberapa perusahaan kontraktor mengikuti langkah yang sama, pemilik perusahaan beranggapan jika mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamosostek maka keuntungan yang diperoleh perusahaan sedikit, pihak jamsostek tidak pernah memberikan sosialisasi kepada perusahaan kontraktor yang ada di kota Sawahlunto sehingga banyak perusahaan yang tidak paham mengenai program jamsostek, jarak kantor jamsostek yang jauh dari Kota Sawahlunto, prosedur pengurusan klaim yang begitu rumit.

BABI

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang paling penting bagi perusahaan. Tenaga kerjalah yang menjalankan pekerjaan pabrik, merencanakan dan mengawasi, melakukan pekerjaan administrasi (Wetik, 1986 : 11). Hal yang senada juga disampaikan oleh Rekson Silaban, menurutnya dalam melakukan pekerjaan, kecelakaan kerja tidak dapat dihindari oleh tenaga kerja. Fakta yang menjadi titik tolak keprihatinan adalah kenyataan bahwa banyak buruh yang belum mendapatkan jaminan sosial yang layak. Idealnya, setiap perusahaan harus memberikan jaminan sosial bagi setiap tenaga kerjanya. Namun dalam kenyataan, yang terjadi justru jauh lebih banyak perusahaan yang belum menyertakan semua tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial (Rekson Silaban, 2009; 76).

Negara-negara yang menganut sistem kesejahteraan (welfare state), sistem jaminan sosial yang baik dimaknai sebagai titik sentral makna eksistensi negara. Negara ada untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan rakyat ada demi prestise negara. Memang tidak ada konsep baku tentang sistem jaminan sosial di suatu Negara. Tetapi, secara umum seperti yang diusulkan oleh Bank Dunia dan ILO (International Labour Organization), sistem jaminan sosial haruslah meliputi 3 lapis (tier) jaminan sosial, yaitu: Pertama, bantuan sosial (social assistance) yang berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net), untuk semua warga negara. Bantuan sosial murni berasal dari pengelolaan pendapatan negara atau penerimaan

pajak, diatur oleh negara, utamanya berbentuk skema bantuan penghasilan terutama untuk lapis masyarakat yang paling membutuhkan. Kedua, asuransi sosial (social insurance) yang berasal dari kontribusi dari warga, dan dapat dikelola oleh swasta. Ketiga, jaminan sosial sukarela (voluntary), biasanya dalam bentuk tunjangan pensiun yang diadakan oleh warga dengan insentif dari pemerintah (Michael Raper, 2008; 1).

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Sistem jaminan sosial di Indonesia saat ini menjangkau para buruh perusahaan-perusahaan swasta (dalam program Jamsostek) yang diatur secara wajib melalaui Undang-Undang No.3 tahun 1992. Pegawai negeri (dalam program Taspen dan Askes), serta anggota ABRI dan keluarganya (dalam program Asabri). Sistem ini menyediakan manfaat berupa sejumlah uang jika peserta sudah memasuki usia pensiun, pada saat kematian dan pemakaman, kematian dan kecelakaan kerja (Michael Raper, 2008 : 10).

PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara mengganti kerugian atas peristiwa tidak tentu, peserta sebagai tertanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran kepada penanggung. Dalam hal ini Jamsostek merupakan suatu bentuk program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang pembentuknya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan rakyat.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1.1 Alasan Perusahaan Kontraktor Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Program Jamsostek

Berdasarkan data di lapangan disimpulkan bahwa, alasan perusahaan kontraktor tidak mau mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek adalah:

- 1. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior) karena perilaku didasari oleh pengetahuan akan lebih langsung (lama bertahan) dari pada perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Dari data di lapangan ditemukan masih banyak perusahaan kontraktor yang tidak mengerti tentang Jamsostek. Pengetahuan merupakan aspek penting yang mempengaruhi perusahaan kontraktor, dimana dengan adanya pengetahuan tentang jamsostek maka akan memotifasi pihak perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamsostek.
- Kebiasaan atau tradisi tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jamsostek merupakan suatu tradisi yang sudah mengalir

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal . 2005. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. FISIP. Universitas Andalas.
- Asikin, Zainal. 2002. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Benda, Von Franz (et.al). 2001. Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial. Yogyakarta
 : Pustaka Pelajar.
- Budiono, Racmad Abdul. 1999. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Fauzi, Mohammad. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Semarang: Walisongo Press.
- Husni, Lalu. 2003. Pengantar Hukum Ketenegakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Magnis, Franz dan Suseno. 2001. Pemikiran Karl Marx. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mallo, Manase. 1986. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: UT.
- Marbun, Rocky. 2010. Jangan Mau di PHK Begitu Saja. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Muawiyah Andi. 2009. Peta Pemikiran Karl Marx. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.
- Mulyana, Deddy.2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.